

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMAKSIMALKAN POTENSI NIKEL DI INDONESIA

11

Niken Paramita Purwanto¹

Abstrak

Sebagai negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, transformasi global menuju kendaraan listrik (EV) membuka peluang besar bagi Indonesia. Nikel, sebagai bahan utama dalam baterai lithium-ion, sangat diperlukan seiring dengan meningkatnya permintaan kendaraan listrik. Kebijakan hilirisasi yang ditetapkan dalam Permen ESDM No. 17 Tahun 2020 bertujuan untuk melarang ekspor nikel mentah dan memaksimalkan pengolahan nikel di dalam negeri, sehingga meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi. Tulisan ini bertujuan kebijakan pemerintah dalam upaya memaksimalkan potensi cadangan dan produksi nikel di Indonesia. Meskipun Indonesia menghasilkan nikel dalam jumlah besar, tantangan seperti kebutuhan pembangunan smelter dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masih harus diatasi. AKD Komisi yang membidangi energi perlu mendorong pemerintah dan memberikan dukungan kebijakan untuk mencapai target pembangunan 53 smelter hingga 2024. Diharapkan dengan adanya pemanfaatan potensi nikel melalui pengembangan industri smelter dan baterai EV dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar global dan menciptakan peluang ekonomi baru.

Pendahuluan

Transformasi global menuju era kendaraan listrik (EV) telah membuka peluang signifikan bagi Indonesia. Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat strategis untuk menjadi pusat produksi baterai EV global. Nikel,

sebagai komponen utama dalam baterai lithium-ion, menjadi komoditas yang sangat dibutuhkan seiring meningkatnya permintaan kendaraan listrik. Potensi ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam upaya mitigasi perubahan iklim.



¹ Analisis Legislatif Ahli Muda Bidang Ekkuinbang pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: niken.purwanto@dpr.go.id.



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa sekarang ketika dunia berbicara *green energy* dan *green industry*, Indonesia mempunyai keunggulan komparatif yang tidak banyak dimiliki oleh negara lain. Indonesia akan menjadi penentu utama dalam industri mobil listrik global berkat kekayaan sumber daya alam, salah satunya nikel. Berdasarkan data Geologi Amerika pada 2023 mengatakan bahwa Indonesia memiliki 20% cadangan nikel di dunia (Alamsyah, 2024).

Nikel merupakan komponen kunci dalam produksi baterai EV yang kini menjadi fokus global seiring dengan transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan. Bahan baku mobil listrik terdiri dari 60% komponen mobil dan 40% baterai. Dari segi baterai, terdapat empat komponen utama sumber bahan bakunya yaitu mangan, kobalt, litium, dan nikel. Dari keempat komponen utama tersebut, nikel memiliki porsi yang sangat besar sebagai bahan baku yakni mencapai 80% (Alamsyah, 2024). Tulisan ini bertujuan mengkaji upaya pemerintah dalam membuat kebijakan dalam memanfaatkan cadangan nikel dan memproduksi nikel dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Potensi Cadangan dan Produksi Nikel di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi cadangan nikel yang sangat besar. Total sumber daya nikel di Indonesia diperkirakan mencapai 17,7 miliar ton bijih dan 177,8 juta ton logam, dengan cadangan nikel yang dapat diakses sebesar 5,2 miliar ton bijih dan 57 juta ton logam (Meilanova, 2024). Angka-angka ini menunjukkan bahwa potensi nikel Indonesia adalah salah satu yang terbanyak di dunia, meskipun belum sepenuhnya potensi tersebut dieksplorasi dan dimanfaatkan.

Dari sisi produksi, Indonesia telah menghasilkan 1,8 juta metrik ton nikel atau setara dengan 50% dari total produksi nikel global (Anam, 2024). Kontribusi besar ini menempatkan Indonesia di posisi terdepan dalam industri nikel dunia. Hal tersebut memberikan pengaruh besar pada pasar internasional dan menegaskan peran penting Indonesia dalam memenuhi kebutuhan global akan nikel.

Dengan peningkatan produksi nikel di Indonesia, terutama pada tahun 2021 mengakibatkan lonjakan ekspor nikel. Volume ekspor nikel Indonesia meningkat hingga 6 kali lipat atau 520 % dibanding tahun sebelumnya (Kusnandar, 2022). Hal ini tentu saja berkontribusi dalam membantu Indonesia meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekspor nikel menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara. Indonesia diuntungkan dengan keberadaan nikel yang melimpah, akan tetapi dalam pengolahannya nikel membutuhkan tenaga ahli, teknologi, dan infrastruktur yang memadai.

Kebijakan Hilirisasi Industri Nikel

Indonesia sebagai negara eksportir dan produsen nikel global, saat ini telah menetapkan kebijakan larangan ekspor nikel mentah. Indonesia sebenarnya telah menetapkan kebijakan larangan ekspor dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah. Namun dalam kedua kebijakan tersebut, dinilai masih belum optimal dalam mengatur larangan ekspor mineral mentah

sehingga peraturan tersebut telah dicabut dan diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia kembali menetapkan kebijakan dalam mengelola sumber daya alamnya, melalui Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam peraturan tersebut Indonesia secara tegas melarang ekspor nikel mentah karena kebijakan minerba sebelumnya dinilai kurang efektif dan efisien serta dapat menimbulkan kerugian dalam mengelola bijih nikel mentah.

Terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar kebijakan sektor minerba yang ditetapkan Indonesia. Faktor internal: 1. Hilirisasi, 2. Menciptakan Lapangan Pekerjaan 3. Peningkatan Investasi 4. Peningkatan Pembangunan Nasional (Firdaus, 2022). Hilirisasi menjadi fokus utama Pemerintah Indonesia. Hilirisasi merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah suatu komoditas (nikel). Hilirisasi dilakukan dengan mengolah bahan baku mentah (industri hulu) menjadi barang jadi (industri hilir). Dalam Permen ESDM No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah berkomitmen untuk mendorong program hilirisasi agar dapat berjalan dengan baik. Kebijakan hilirisasi nikel bertujuan untuk mengoptimalkan potensi nikel Indonesia melalui pengembangan

industri smelter dan EV. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai tambah produk nikel, tetapi juga pada pengembangan sektor industri yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah menyepakati untuk membangun smelter dan memperketat larangan ekspor nikel mentah sebagai upaya untuk tidak terus-menerus menjadi pemasok nikel mentah bagi konsumen asing. Selain itu, hilirisasi diharapkan akan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkontribusi pada perbaikan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan asing akan membutuhkan tenaga kerja yang akan dilatih dan dibina sehingga dapat menghasilkan tenaga ahli baru yang profesional. Hal ini juga akan berdampak dalam menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Program hilirisasi tentunya akan mempercepat pertumbuhan investasi di Indonesia. Nilai investasi yang terus meningkat akan mempermudah pembangunan nasional.

Memaksimalkan Pengolahan Nikel

Setelah penerapan kebijakan hilirisasi dengan membatasi ekspor nikel, pendapatan Indonesia meningkat menjadi Rp. 510 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan sebelum hilirisasi yang hanya mencapai Rp. 17 triliun pada tahun 2023 (Putri, 2023). Kenaikan pendapatan negara yang signifikan ini menjadi salah satu alasan utama di balik larangan ekspor nikel, yang merupakan bagian dari upaya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Dengan pelarangan ekspor nikel mentah, nikel harus diolah terlebih dahulu di Indonesia sebelum diekspor.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa komoditas nikel, yang merupakan bahan baku penting dan strategis, tidak dikuasai oleh negara-negara konsumen (Agung & Adi, 2022). Kebijakan pelarangan ekspor ini merupakan hak Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam.

Namun, untuk mengolah nikel menjadi produk bernilai tambah, tentunya dalam pemrosesan dan pengelolaandibutuhkan smelter yang berfungsi untuk tempat pemurnian nikel. Di Indonesia, jumlah smelter masih terbatas, sehingga pemerintah perlu mengembangkan lebih banyak smelter. Target pemerintah adalah membangun 53 smelter hingga tahun 2024 untuk mengoptimalkan produksi nikel menjadi produk yang memiliki nilai tambah.

Penutup

Cadangan nikel yang melimpah dan kontribusi signifikan terhadap produksi global, Indonesia memiliki posisi strategis. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan proteksionisme nikel melalui Permen ESDM No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang fokus pada hilirisasi. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi nikel Indonesia dalam perdagangan internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dengan memaksimalkan pengolahan nikel menjadi produk bernilai tambah. Selain itu, kebijakan hilirisasi juga mendukung terbentuknya ekosistem pusat produksi EV di Indonesia.

Upaya pemanfaatan potensi nikel perlu mendapat perhatian dari AKD Komisi yang membidangi energi di DPR RI, dari sisi pengawasan

perlu mencapai target pembangunan smelter sebanyak 53 hingga tahun 2024. Dengan adanya penambahan smelter maka Indonesia akan lebih cepat dalam memproduksi nikel menjadi bahan tambah. Pemerintah juga harus meningkatkan *skill* sumber daya manusia sebab Indonesia akan menjadi pusat produksi baterai di dunia.

Referensi

- Alamsyah, I.E . (2024, Oktober 15). Bahlil: Industri mobil listrik dunia bergantung pada Indonesia. *Republika.com* <https://ekonomi.republika.co.id/berita/sle756349/bahlil-industri-mobil-listrik-dunia-bergantung-pada-indonesia>
- Anam, K . (2024, Juni 2024). Sumbang setengah produksi dunia, ini potensi hilirisasi nikel RI. *cnbcindonesia.com*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240620161406-4-547888/sumbang-setengah-produksi-dunia-ini-potensi-hilirisasi-nikel-ri>
- Agung, M., & Adi, E. A. W. (2022). Peningkatan Investasi Dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(2), 4009–4020. DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3085>
- Firdaus, S.R. (2022). Pembatasan ekspor nikel: Kebijakan nasional vs unfairness treatment hukum investasi internasional. *LAN* . <https://lan.go.id/?p=10221>
- Kusnandar, V.B. (2022). Volume dan nilai ekspor nikel Indonesia periode Januari Juli (2021-2022). *katadata.co.id*. <https://databoks.katadata.co.id/index.php/datapublishembed/142992/volume-ekspor-nikel-indonesia-melonjak-6-kali-lipat-sepanjang-januari-juli-2022>

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubar. (2019).

Meilanova, D.R . (2024, Agustus 28). Daftar 10 negara penghasil nikel terbesar di dunia 2024. bisnis.com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240828/44/1794432/daftar-10-negara-penghasil-nikel-terbesar-di-dunia-2024>

Putri, A.M.H. (2023, Agustus 14). Bukan omong kosong! Ini bukti proyek kebanggaan Jokowi Untung. cnbcindonesia.com. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230814065554-128-462593/bukan-omong-kosong-ini-bukti-proyek-kebanggaan-jokowi-untung>